TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6107-6116
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Performance of the Fire Department in Handling House Fires in the Suliki District

Abdul Harits. M[1], Zikri Alhadi[2]
* abdulharits016@gmail.com, zikrialhadi@fis.unp.ac.id
[1] Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT
This study is motivated by the important role of the Fire and Rescue Department in providing protection and a sense of security to the community through fire disaster management, especially in the working area of the Suliki Subdistrict Auxiliary Post, Lima Puluh Kota Regency. In practice, it has been observed that the performance of fire disaster services is not yet running optimally. This study aims to analyze and describe the performance of the Fire Department at the Suliki Subdistrict Auxiliary Post and to identify the supporting and inhibiting factors that affect it. The method used is a qualitative approach with a descriptive type. Informants were determined using purposive sampling technique with a total of 13 informants, consisting of structural officials from the agency, field personnel/support post officers, experts, and community members who experienced or were directly affected by the fire incident. Data collection was conducted through non-participant observation, in-depth interviews, and documentation study. Data validity was tested using source, method, and time triangulation techniques, while data analysis used the interactive model from Miles and Huberman, which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results were analyzed based on four organizational effectiveness indicators from Richard M. Steers, namely goal attainment, integration, adaptation, and job satisfaction. The findings show that in terms of emergency response (response time) and personnel morale, the officers have made their best efforts to carry out their duties with high readiness. However, overall performance still faces significant obstacles, including limited numbers and aging fleet conditions, minimal personal protective equipment, geographical challenges and narrow, winding road access to the most remote villages, limited sources of static water, and the not-yet-optimal organization of the local Fire Volunteer (Redkar) groups.

Keywords: Firefighters, Performance, Fire Response, House Fires

PENDAHULUAN
Kebakaran rumah merupakan salah satu bentuk bencana yang memiliki potensi tinggi menimbulkan kerugian, baik dalam aspek material, lingkungan, maupun sosial (Ruslan and Amin 2021). Dalam konteks pembangunan daerah, kebakaran tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa manusia serta keberlangsungan lingkungan hidup (Asmarita, Siboro, and Rusba 2025). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan pemadam kebakaran sebagai garda terdepan dalam penanganannya.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang penanggulangan kebakaran, penyelamatan, serta pencegahan bahaya kebakaran (Saputra et al. 2025). Kinerja instansi Dinas Pemadam Kebakaran menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode (Suherman 2023). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada para pegawai (Arlan 2022). Kinerja tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kecepatan tanggap terhadap laporan kebakaran, ketepatan tindakan di lapangan, kesiapan sarana dan prasarana, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), serta efektivitas koordinasi lintas sektor (Gustina, Oktaviane, and Assyahri 2025).

Beberapa penelitian terdahulu secara konsisten mengemukakan adanya variasi kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran. Penelitian (Luh et al., 2016.) menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terbukti karena masih adanya masalah yang ditemui Damkar badung dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu pada sumber daya manusia, masih kurangnya jumlah petugas pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung. Permasalahan kedua yaitu masih kurangnya pos pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Badung, dan permasalahan ketiga yaitu masih kurangnya jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada petugas pemadam kebakaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gustina et al. 2025) yang menemukan bahwa kinerja pelayanan dalam penanggulangan kebakaran belum berjalan optimal secara menyeluruh. Hal ini dapat diketahui dari indikator efektivitas karena belum maksimalnya pencapaian standar pelayanan minimal akibat keterbatasan sarana, kualitas layanan yang masih menghadapi keluhan terkait kecepatan waktu tanggap (*response time*) menuju lokasi kebakaran, serta responsivitas yang terkendala oleh hambatan geografis dan teknis di lapangan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terlihat bahwa kinerja pemadam kebakaran menjadi aspek penting yang perlu terus dianalisis dan ditingkatkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020, pemerintah daerah didorong untuk membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) sebagai partisipasi masyarakat. Namun, di lingkup wilayah Suliki, keberadaan Redkar belum terorganisir dengan maksimal. Kinerja pemadam kebakaran dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat masih sangat minim, sehingga saat terjadi kebakaran, masyarakat cenderung panik dan justru menghambat pergerakan armada di lokasi kejadian karena kerumunan yang tidak teratur (Sutangsa & Suryana, 2023). Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah dengan karakteristik geografis yang beragam memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi, baik di kawasan permukiman padat penduduk maupun di area perkebunan dan lahan produktif. Dengan begitu dibutuhkan kinerja pemadam kebakaran yang cepat, tanggap, dan professional. Apalagi pada beberapa waktu terakhir bencana kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat meningkat yang disebabkan oleh kemarau panjang (Syafitri, 2024)

Data kejadian kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan kebakaran di wilayah ini bersifat dinamis dengan sebaran yang tidak merata di 13 kecamatan. Peningkatan kasus kejadian kebakaran menuntut kesiapsiagaan armada damkar dalam merespons dinamika ancaman kebakaran di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Lonjakan signifikan yang terjadi menjadi indikator

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

penting bahwa risiko kebakaran rumah dan bangunan memerlukan perhatian khusus dalam hal manajemen tanggap darurat. Fenomena fluktuasi kasus, seperti peningkatan di Kecamatan Suliki dari 2 menjadi 6 kejadian serta kondisi di Bukik Barisan dan Gunuang Omeh yang mencatatkan angka 0 hingga 2 kasus, menuntut kesiapsiagaan armada dalam merespons ancaman secara cepat.

Berdasarkan data pemutakhiran tahunan dari *Open Data* Kabupaten Lima Puluh Kota hingga Desember 2025, terlihat adanya dinamika yang kontradiktif dalam penanggulangan bencana kebakaran. Memasuki periode awal tahun 2026, urgensi evaluasi kinerja dinas terkait semakin menguat seiring dengan terjadinya rentetan peristiwa kebakaran pemukiman, pada 22 Februari 2026, berdasarkan laporan (kabarminang) pada 2026, satu unit rumah warga di Nagari Pangkalan dilaporkan habis terbakar tanpa sisa, selain itu juga terjadi kebakaran pada 1 Maret 2026 di Tanjung Munti, Nagari Sungai Beringin, di mana api menghanguskan area seluas ±175 m2. Dinamika ancaman ini menuntut kesiapsiagaan operasional yang tinggi, yang secara teknis diakomodasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran melalui keberadaan 1 posko induk dan 7 posko pembantu yang tersebar secara strategis untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut. Keberadaan posko pembantu tersebut harus dikorelasikan secara konkret dengan kemampuan *response time* dan penurunan angka kerugian pada wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan berbeda tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara terhadap tim pemadam kebakaran posko pembantu Kecamatan Suliki yang dilakukan pada tanggal 5- 6 November 2025, peneliti memperoleh berbagai informasi dari petugas pemadam kebakaran terkait dengan kinerja dalam penanggulangan bencana kebakaran. Hasil observasi ini mengungkapkan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemadam Kebakaran Posko Unit Kecamatan Suliki dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini secara langsung mendegradasi capaian waktu tanggap (*response time*) dan memperburuk efektivitas pemadaman pada fase puncak api (*flashover*). Selain itu, keterbatasan kuantitas dan sertifikasi kompetensi personel di tengah luasnya jangkauan wilayah pelayanan yang mencakup tiga kecamatan sekaligus, memperkuat bahwa kinerja Pemadam Kebakaran belum optimal dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan kebakaran

Dari sisi kinerja petugas pemadam kebakaran, ditemukan beberapa hambatan dalam menjalankan tugas. Diantaranya yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana operasional masih sangat terbatas. Beberapa kendaraan pemadam yang digunakan telah berumur tua dan sering mengalami kerusakan teknis, sehingga menghambat efektivitas penanganan kebakaran di lapangan. Selain itu, belum adanya penampungan air di unit membuat personel pemadam kebakaran harus mencari sumber air terdekat dari lokasi kebakaran. Hal ini diperparah oleh keterbatasan jumlah personel. Berbagai hambatan tersebut menuntut adanya evaluasi manajemen kinerja, khususnya terkait urgensi pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas secara rutin agar mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, tanggap, dan tepat dalam situasi darurat di Kecamatan Suliki.

Dari sisi masyarakat, sebagian informan mengungkapkan bahwa mereka masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap bahaya kebakaran dan upaya pencegahannya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan simulasi, pelatihan penanggulangan kebakaran, atau kerja sama dengan pihak pemadam kebakaran masih minim. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelaporan kebakaran yang benar, bahkan beberapa wilayah belum memiliki akses langsung terhadap pos pemadam terdekat. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa layanan pemadam kebakaran belum sepenuhnya cepat dan responsif. Faktor utama yang memengaruhi hal tersebut adalah keterbatasan kendaraan, jarak tempuh ke lokasi kejadian yang jauh, dan kondisi jalan yang sulit diakses, terutama di daerah pedesaan atau perbukitan. Meskipun demikian, masyarakat tetap mengapresiasi kerja keras petugas yang berusaha maksimal dengan fasilitas yang terbatas.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Selain armada, kinerja pemadam kebakaran sangat bergantung pada ketersediaan *Static Water Supply* (Pasokan Air Statis). Hasil observasi awal menunjukkan bahwa di wilayah kerja posko pembantu Suliki, minimnya keberadaan hidran kota yang berfungsi memaksa petugas bergantung pada sumber air alami seperti sungai atau kolam milik warga. Proses penyedotan air (*drafting*) dari sumber alami memakan waktu tambahan 5-10 menit, yang secara langsung mendegradasi kualitas kinerja penanggulangan saat api sedang berada pada fase *flashover* (puncak pertumbuhan api).

Berbagai isu dan permasalahan yang terjadi, mulai dari kendala internal organisasi seperti keterbatasan sumber daya (input) dan inefisiensi proses operasional, hingga hambatan eksternal berupa kendala geografis dan rendahnya partisipasi masyarakat di lingkup kerja posko pembantu Kecamatan Suliki, secara kumulatif menunjukkan adanya kesenjangan kinerja (*performance gap*) yang signifikan dalam penanggulangan kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Pemadam Kebakaran posko pembantu Kecamatan Suliki dalam penanggulangan kebakaran rumah., dan (2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat utama (internal dan eksternal) yang paling signifikan memengaruhi dan menyebabkan belum optimalnya kinerja Pemadam Kebakaran posko pembantu Kecamatan Suliki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena jenis penelitian ini dapat menjelaskan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kinerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota studi kasus Kecamatan Suliki terhadap penanggulangan kebakaran dengan nyata. (Moleong, 2017; Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu dan sesuai dengan kriteria pemilihan informan yaitu memiliki informasi dan ikut terlibat dalam penanggulangan kebakaran rumah di Kecamatan Suliki. (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 13 orang sebagai sumber informasi, dan yang akan menjadi subyek bagi peneliti ialah sekretaris dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten lima puluh kota, pakar ahli, kepala regu posko pembantu suliki, danru, *driver*, anggota pemadam kebakaran, masyarakat, dan korban kebakaran rumah.

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, setelah itu, penulis mewawancarai setiap informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti Selanjutnya, penulis melakukan dokumentasi yang bermanfaat untuk mendukung fakta lapangan (Semiawan, 2022). Lokasi dari objek penelitian ini adalah Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data di lapangan yaitu mulai dari tanggal 14 Mei sampai 14 Juni 2026. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil wawancara antar informan dan isi dokumen yang berkaitan (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Penanggulangan Kebakaran Rumah

Untuk menilai efektivitas kinerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran rumah, peneliti menggunakan 4 (empat) indikator efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh *Richard M. Steers* (1985) sebagai berikut:

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pencapaian Tujuan

Pada indikator pencapaian tujuan, tujuan utama Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan misi, yaitu *response time* (waktu tanggap) sejak laporan diterima hingga armada tiba di lokasi. Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan penanggulangan kebakaran rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan secara optimal atau belum sepenuhnya efektif yang disebabkan karena kondisi geografis. Pernyataan ini disampaikan oleh kepala regu posko pembantu pemadam kebakaran Kecamatan Suliki Bapak (W) yang menyatakan bahwa: …”“*jika bicara mengenai standar pelayanan kita juga perlu melihat bagaimana kondisi wilayah sekitar. Jika kita bandingkan dengan wilayah di kota, waktu perkiraan 15 menit mungkin bisa ditargetkan karena wilayah perkotaan jalannya besar, atau tidak banyak tantangan untuk sampai ke lokasi kejadian. Untuk wilayah kecamatan suliki sekitar jalannya sempit, apalagi jika ada lokasi kejadian di Nagari Maek bulan Januari lalu, memakan waktu kurang lebih 45 menit ke lokasi karena jalannya curam, penurunannya banyak, jika driver bawa armada harus hati-hati kalau tidak bisa masuk jurang*…”.

Berdasarkan faktor geografis yang dihadapi oleh Posko Pembantu Kecamatan Suliki, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang terjal dan sulit, seperti akses jalan yang sempit, rusak, serta berliku dan curam berjurang menuju lokasi pemukiman warga seperti di Nagari Maek. Selain itu, kondisi armada pemadam membatasi ruang gerak serta kecepatan petugas di perjalanan karena berisiko membahayakan keselamatan personil. Kondisi tersebut menyebabkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa *response time* (waktu tanggap 15 menit) sering kali tidak tercapai untuk nagari-nagari yang berada jauh dari posko, sehingga kerugian material akibat kebakaran rumah berkonstruksi kayu masih tergolong tinggi. Hal yang sama juga disampaikan oleh *driver* posko pembantu Kecamatan Suliki yaitu Bapak (FF) yang menyatakan: *“..untuk kondisi wilayah dan armada di posko ini untuk standar pelayanan mungkin tidak sempurna karena mengingat jalannya yang kecil dan banyak rusak. Apalagi armada di posko ini kecil jadi kalau dibawah agak cepat anggota yang ada diatas bisa kemungkinan jatuh karena mobil armada oleng…”*..

Keterlambatan waktu tanggap (*response time*) menuju nagari-nagari yang jauh seperti Nagari Maek, Sungai Naniang, Koto Tinggi, Baruah Gunuang tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk kegagalan kinerja operasional Damkar. Risiko keselamatan personil saat melintasi jalur bercuram dan berjurang menjadi pertimbangan rasional yang membatasi kecepatan armada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak (IP) sebagai pakar ahli menyatakan: *“SPM nasional tetap penting sebagai hak minimum masyarakat dan tidak boleh diturunkan karena alasan geografis. Namun, penilaian kinerja Damkar tidak adil jika hanya menggunakan waktu tanggap tanpa melihat luas wilayah, kondisi jalan, jumlah pos, dan sebaran penduduk. Karena itu, daerah perlu memiliki standar lokal sebagai pelengkap, bukan pengganti SPM nasional”.*

Integrasi

Richard M. Steers (1985) mengemukakan bahwa integrasi ditujukan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi mampu melakukan sosialisasi, memelihara komunikasi yang efektif, serta membangun konsensus dan kohesi internal guna mencapai tujuan bersama. Integrasi internal kinerja dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan diimplementasikan dalam kerja sama antar posko/personel Damkar di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota. Kerja sama ini diwujudkan melalui sistem koordinasi terpadu dan komunikasi radio darurat yang terintegrasi, sehingga penentuan titik lokasi, pembagian peran personel (seperti tim penyerang, suplai air, dan penyelamatan), serta pengerahan bantuan armada cadangan dari posko terdekat dapat dilakukan secara cepat, presisi, dan terstruktur saat kebakaran rumah terjadi. Pernyataan ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak (BS) sebagai berikut: *"Sistem komunikasi internal kita di Kabupaten Limapuluh Kota ini sudah terhubung melalui frekuensi radio*

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

darurat (HT) dan grup koordinasi cepat antar-posko. Begitu ada laporan masuk ke salah satu pos/posko induk, informasi titik lokasi langsung disebarkan real-time. Di lapangan, personel sudah paham pembagian tugasnya, ada yang fokus ke penyerangan/pemadaman titik api, suplai air, dan tim penyelamat. Kalau skala kebakarkannya besar, posko terdekat bisa langsung back-up pengerahan armada tambahan tanpa harus menunggu alur yang berbelit-belit.".

Selain kesiapan sistem komunikasi dan pembagian peran di internal Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten Lima Puluh Kota, efektivitas penanggulangan kebakaran rumah juga sangat ditentukan oleh kemampuan Damkar dalam memperluas jangkauan integrasinya melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Sejalan dengan konsep integrasi *Richard M. Steers*, dimensi kelancaran komunikasi dan koordinasi Damkar tidak hanya berhenti pada alur internal antar-posko, tetapi juga mencakup efektivitas hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, bapak WS menyampaikan *"...setiap posko pembantu di Kabupaten Limapuluh Kota telah dilengkapi dengan jaringan komunikasi dan data kontak darurat lintas instansi (seperti PLN, kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah nagari). Ketika laporan kebakaran diterima oleh salah satu posko, petugas yang bertugas tidak hanya membagi peran internal, tetapi juga secara responsif menghubungi pihak PLN untuk pemutusan arus serta aparat 47 keamanan untuk pengkondisian lapangan sesuai kebutuhan operasional…"*

Dimensi integrasi internal dan eksternal Damkar telah terwujud secara responsif melalui jaringan komunikasi internal dan darurat lintas instansi (PLN, kepolisian, satpol PP, dan pemerintah nagari) yang berjalan secara simultan bersama pembagian tugas internal di lapangan. Namun, kesiapan internal dan koordinasi antar instansi tersebut baru akan mencapai efektivitas jika didukung dengan sosialisasi dan edukasi masyaraka dimana masyarakat diajak secara aktif menjadi bagian dari sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Adaptasi

Indikator adaptasi dalam lingkup penanggulangan kebakaran yaitu mengukur kemampuan, fleksibilitas, dan daya tanggap dalam menyesuaikan diri terhadap kendala lingkungan, hambatan geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta situasi darurat yang tidak terduga di lapangan. Kemampuan adaptasi personil pemadam kebakaran dan penyelematan posko pembantu suliki tergolong cukup adaptif secara teknis operasional, namun belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan kelengkapan alat pendukung. Pernyataan tersebut didukung melalui hasil wawancara dengan Bapak (BS) sebagai berikut: *"...terkait dengan ketersedian APD di lapangan yaitu belum meencukupi tetapi sudah ada, yang mana aturan sebenarnya setiap pemadan kebakaaran memiliki pakaian safety (apd) masing masing"* **.** Satu faktor krusial yang sangat menentukan fleksibilitas dan daya adaptasi petugas di lapangan adalah ketersediaan APD dan perlengkapan pemadam yang layak. Dalam operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota alokasi dana untuk pengadaan, pemeliharaan, serta pembaruan APD bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Pos Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran.

Namun demikian, besarnya alokasi dana tersebut belum secara otomatis menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan operasional di lapangan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak (IP) sebagai pakar ahli yang menyatakan bahwa*: "...anggaran Damkar belum dapat dinilai hanya dari besar nominalnya, tetapi harus dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Jika masih terdapat kecamatan yang belum terlayani maksimal, kekurangan armada, keterbatasan pos, dan masalah komunikasi, berarti kebutuhan pelayanan belum sepenuhnya terpenuhi. Anggaran sebaiknya disusun berdasarkan tingkat risiko, kesenjangan pelayanan, dan kebutuhan setiap wilayah…"*

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Motivasi dan Kepuasan Kerja

Indikator motivasi dan kepuasan kerja dalam lingkup penanggulangan kebakaran mengukur dorongan moral, dedikasi, serta tingkat kepuasan personil Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas penyelamatan di tengah tingginya risiko pekerjaan. Motivasi kerja personil pemadam kebakaran posko pembantu suliki tergolong sangat tinggi secara dedikasi dan empati kemanusiaan. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak (W) yang menyatakan: *"…kita kalau ada laporan masuk siapapun regu yang piket langsung menanggapi, dan langsung tindakan ke lokasi. Sekarang warga jika ada yang melapor lebih cepat melalui WA, semua tim langsung ke lapangan dengan niat tidak mengharapkan balasan dari warga…".]*

Tingginya moral dan komitmen petugas di lapangan juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak (FF): *"…pekerjaan ini memang resikonya taruhan nyawa dan fasilitas kita kadang terbatas, tapi kepuasan utama kami itu kalau berhasil memadamkan api dan tidak ada korban jiwa. Rasa lelah langsung hilang begitu lihat warga selamat, itu yang bikin kami tetap solid dan semangat setiap ada panggilan darurat..."*

Indikator motivasi dan kepuasan kerja pada pemadam kebakaran posko pembantu Kecamatan Suliki telah terpenuhi dari dimensi pengabdian dan mentalitas pelayanan dasar. Meskipun tugas penanggulangan kebakaran tergolong pekerjaan berisiko tinggi (*high risk job*) dan dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana, dorongan moral personel tidak menyurutkan kesiapsiagaan (readiness) mereka dalam merespons laporan masyarakat. Kepuasan kerja petugas Damkar tidak melulu bersumber dari imbalan materiil, melainkan didorong oleh intrinsic motivation berupa rasa kemanusiaan, empati, dan pencapaian fungsi penyelamatan.

Faktor Pendukung Penanggulangan Kebakaran Rumah di Kecamatan Suliki

Keberhasilan serta efektivitas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran rumah pemukiman tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya di lapangan. Keberadaan faktor pendukung menjadi pendorong utama kelancaran mobilisasi tim di situasi darurat. Kedisiplinan serta komitmen personel dalam mematuhi sistem siaga piket 24 jam menjadi fondasi utama penanganan situasi darurat. Sistem pembagian kerja terstruktur ini memastikan seluruh anggota tim tetap berada dalam kondisi prima dan siap dimobilisasi kapan saja tanpa penundaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak (NA), menyatakan : *"…di posko pembantu ini ada tiga regu, setiap regu lima orang. anggota. Selama jam dinas, seluruh anggota regu diwajibkan bersiaga penuh di markas dan tidak diperbolehkan meninggalkan area tanpa izin operasional. Begitu ada laporan masuk, masing masing anggota tugasnya sudah terbagi, ada yang mengemudikan armada, menyiapkan perlengkapan dan lain lain…".*. Kesiapsiagaan dan respons cepat regu tim pemadam kebakaran menjadi faktor pendukung yang terbangun melalui kedisiplinan sistem piket 24 jam dan kejelasan pembagian tugas. Kebijakan yang mewajibkan anggota piket di posko memastikan mobilisasi armada dapat dilakukan secara cepat begitu laporan diterima, kesiapsiagaan ini menjadi bentuk penyesuaian terhadap kondisi objektif pemukiman warga yang didominasi bangunan semi permanen.

Keberadaan Posko Pembantu dalam sistem pelayanan publik dalam layanan tanggap darurat, penanggulangan bencana, maupun pemadam kebakaran merupakan bentuk perpanjangan tangan dari posko induk. Posko Pembantu didirikan untuk mengatasi kendala geografis, memperpendek jarak tempuh (*response time*), serta memperluas cakupan wilayah operasional yang sulit dijangkau secara cepat dari pusat penanganan. Posko pembantu yang paling dekat dengan Suliki yaitu posko pembantu Mungka. Kedua posko pembantu ini saling bekerja sama karena saling berdekatan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak (W) yang menyampaikan: *"…selain semua posko pembantu yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota ini kita paling dekat jaraknya dengan Mungka, kemaren ada*

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

kebakaran surau di daerah sana kita ikut serta membantu karena kita jaraknya dekat, gotong royong di sini sangat tinggi…" Posko Pembantu tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, melainkan sebagai simpul strategis awal dalam penyaluran bantuan, keberadaan posko pembantu berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan efisiensi waktu tanggap di lapangan.

Faktor Penghambat Penanggulangan Kebakaran Rumah di Kecamatan Suliki

Wilayah cakupan posko pembantu pemadam kebakaran dan penyelamatan Kecamatan Suliki ada tiga kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukik Barisan, dan Kecamatan Gunuang Omeh. Tiga cakupan Kecamatan terdiri dari 14 nagari, yang menjadi prioritas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *driver* Bapak (HN) menyatakan: *"…cakupan wilayah kita cukup luas karena membawahi tiga kecamatan sekaligus: Suliki, Bukik Barisan, dan Gunuang Omeh. Tantangan utama kami adalah waktu tanggap (response time), terutama menuju nagari-nagari terluar yang akses jalannya cukup berbelok-belok dan menanjak…"*. Kondisi wilayah yang membawahi 14 nagari ini menghadirkan tantangan pemenuhan *standard operating procedure* (SOP) dan waktu tanggap. Keterbatasan mobilitas armada damkar di medan yang curam mempengaruhi teknis operasional. Oleh karena itu, faktor geografis dan luas wilayah cakupan menentukan tingkat kerentanan dan tingkat keberhasilan aksi tanggap darurat di posko pembantu Suliki.

Dalam penanggulangan kebakaran, kecepatan serta ketersediaan pasokan air merupakan indikator yang menentukan tingkat keberhasilan pemadaman. Namun, pada wilayah operasional posko pembantu pemadam kebakaran dan penyelamatan Kecamatn Suliki, indikator ini menghadapi kendala yang signifikan di lapangan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak (W), yang menyatakan : *"…masalah kami di sini itu banyak rumah-rumah warga yang masuk simpang, ada kejadian kemaren mobil armada tidak bisa masuk karena terhalang gapura, selain itu kabel rendah juga jadi penghalang untuk mobil…"*. Karakteristik pemukiman penduduk di nagari-nagari cakupan (Suliki, Bukik Barisan, dan Gunuang Omeh) umumnya berupa pemukiman padat, jalan sempit, kabel menggantung, atau kondisi jalan tanah menjadi penghambat bagi armada untuk mendekati titik pusat api (spot of origin). Akibatnya, petugas sering kali terpaksa menyambung banyak selang secara manual dari jarak jauh, yang memakan waktu krusial dan mengurangi tekanan air.

Faktor penghambat lain yaitu sumber air darurat masih sangat terbatas. Petugas sangat bergantung pada sumber air alami seperti sungai dan kolam warga. Kondisi ini menyebabkan proses pengisian ulang air menjadi lama dan berisiko memutus kontinuitas pemadaman saat api sedang berkobar, Bapak (AF) menyatakan: *"…mobil di tangki armada selalu terisi penuh, jika sewaktu-waktu ada kejadian mobil kita langsung siap pakai. Kendala nya untuk disini kita belum ada tangki untuk penampungan air, kita cuman mengandalkan air sungai, di surau-surau, kalau musim kemarau air mengecil, jika dihadapkan dengan kebakaran besar dan memerlukan pengisian ulang tangki itu memakan waktu, belum pergi ke sumber air nya, jalan di sana banyak yang tidak bisa 60 mobil dekati secara dekat, belum lagi waktu pengisian tangki yang memakan waktu…"*.. Keterbatasan aksesibilitas jalan di kawasan pemukiman yang sempit serta sulitnya keterjangkauan titik sumber air menjadi hambatan utama yang berdampak langsung pada peningkatan durasi waktu tanggap (*response time*) serta penurunan efisiensi pemadaman kebakaran di seluruh wilayah cakupan operasional posko pembantu Suliki.

Upaya Penanggulangan Kebakaran Rumah di Lima Puluh Kota

Penanggulangan kebakaran tidak hanya berfokus pada saat bencana terjadi, langkah awal yang bisa diambil untuk langkah penanggulangan kebakaran yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat berupa pengetahuan bagaiman cara memadamkan api yang berasal dari tabung gas, konslet listrik, maupun kebakaran yang timbul dengan cara lainnya, kegiatan ini bisa menjadi pengetahuan masyatakat untuk memadamkan api sebelum damkar tiba di lokasi kejadian. Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lima Puluh Kota telah mengimplementasikan kegiatan sosialiasi ini ke masyarakat. Melalui wawancara Bapak (BS) yang menyampaikan: *"...kegiatan sosialisasi ini sudah menjadi agenda rutin kami di dinas, kami juga bekerja sama dengan BPBD dalam penyuluhan pencegahan dan simulasi kebakaran. Sosialiasi ini tidak hanya 61 disampaikan ke masyarakat tapi juga di mulai dengan anak-anak, anak-anak yang punya pengetahuan tinggi jangan sampai mendatangkan bahaya karena bermain api. Selain itu kami juga bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan, sosialisasi ini disampaikan ke seluruh warga binaan lapas dan pegawai…".*

Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran rumah tersebut belum berjalan secara merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya daerah Kecamatan Suliki. Pernyataan tersebut didukung melalui hasil wawancara dengan Masyarakat Ibu (M), yang menyatakan: *"...setau saya kalo untuk kegiatan sosialisi simulasi atau pencegahan dini kebakaran disini belum ada, harusnya untuk ibu-ibu seperti saya juga membutuhkan ilmu nya gitu, soalnya ibu-ibu lebih sering di dapur, tabung gas yang bocor juga menjadi satu penyebab kebakaran…".* Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu WY yang menyatakan: *"...belum pernah sepertinya nak, saya kebetulan juga masuk anggota PKK, untuk simulasi atauapun sosialisasi di Nagari ini belum ada untuk pencegahan kebakaran, ibu-ibu yang pekerjaan nya ibu rumah tangga seumpa terjadi kebakaran biasanya panik dahulu kalo terjadi kebakaran…"* Kesenjangan atau tidak meratanya pelaksanaan program sosialisasi di masyarakat ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap pola distribusi dan metode sosialisasi. Penyelenggaraan sosialisasi harus mengandalkan pendekatan kolaboratif berbasis nagari agar edukasi keselamatan kebakaran dapat tersampaikan secara merata.

Pada fase bencana kebakaran terjadi, eektivitas penanganan pada tahap ini sangat ditentukan oleh kemampuan mencapai *response time* secara optimal, Keberhasilan tindakan ini didukung penuh oleh kepastian ketersediaan pasokan air (*water supply*), baik melalui pemanfaatan *instalasi hydrant* pemukiman maupun sumber air alami di sekitarnya. Pada fase tanggap darurat, penanganan di lapangan masih menghadapi kendala krusial berupa keterbatasan pasokan air di permukiman serta kepanikan kerumunan warga yang menghambat lalu lintas armada. Masalah penanganan awal tersebut dipengaruhi karena belum adanya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) resmi di tingkat Nagari. Meski demikian, kesiapsiagaan personil tetap ditunjang oleh pembekalan pelatihan pertolongan pertama (first aid) serta prosedur pendataan laporan kejadian yang rinci guna mendukung proses pemulihan pasca-bencana.

KESIMPULAN

Kinerja penanggulangan kebakaran rumah di wilayah kerja Posko Pembantu Kecamatan Suliki secara keseluruhan belum optimal akibat berbagai kendala substantif di lapangan. Pada aspek tanggap darurat, posko sektor tersebut memang menunjukkan capaian positif dalam menekan *response time*, meminimalkan korban jiwa, serta membangun koordinasi lintas sektoral yang harmonis berkat kesiapsiagaan dan moral personel yang tinggi. Namun, pelaksanaan operasional di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan armada yang sudah tua, minimnya kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), sulitnya akses jalan, serta terbatasnya sumber air saat pemadaman. Di sisi lain, aspek pencegahan dan pemberdayaan masyarakat juga belum berjalan maksimal karena minimnya sosialisasi kebakaran serta belum optimalnya peran Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dalam mitigasi dini di tingkat nagari. Diperlukan pembaruan sarana dan prasarana pemadaman serta penguatan kelengkapan APD guna menunjang efektivitas operasional di lapangan. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran sekaligus

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mengoptimalkan peran Redkar di tingkat nagari agar upaya mitigasi dapat berjalan secara menyeluruh**.**

DAFTAR PUSTAKA

Arlan, Agus Sya'bani. 2022. "Kinerja Pegawai Pada Upt Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin." 4(2):14–21.

Asmarita, Putri Della, Impol Siboro, and Komeyni Rusba. 2025. "Kualitas Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran di PT PLN (Persero) UP2D Kaltimra." 11(3):719–23.

Gustina, Meri, Diga Putri Oktaviane, and Wahib Assyahri. 2025. "Analisis Kualitas Pelayanan Pada Aspek Tangible Dan Reliability Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bukittinggi." 3(2):73–79.

Luh, Ni, Putu Listusari, I. Putu Dharmanu Yudartha, and Wayan Supriliyani. n.d. "Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung)."

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Ruslan, Muhammad, and M. Saleh Al Amin. 2021. "Perancangan Sistem Fire Alarm Kebakaran Pada Gedung Laboratorium XXX." 18:51–61.

Saputra, Edy, Sri Agusmila, Aneta Herlinda, Program Studi, Administrasi Publik, Sekolah Tinggi, Ilmu Administrasi, Peningkatan Responsivitas, and Pemadam Kebakaran. 2025. "Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Di Wilayah Perkotaan (Studi Kecamatan Amuntai Tengah Pada Kantor Satpol . Pp Dan Pemadam Kebakaran)." 2:227–36.

Semiawan, C. R. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Grasindo.

Sugiyono, S. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Suherman, Jimy. 2023. "Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang." 01(06):1316–25.

Sutangsa, S., & Suryana, E. (2023). Perencanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Subang: Sebuah tinjauan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 330–342.

Syafitri, N. N., Yuliati, & Perdana, D. D. (2024). Komunikasi partisipatif relawan pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran di Kota Bengkulu. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 8(2), 89–102.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.